

**REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
NAKHODA DAN PANDU DALAM UNDANG-UNDANG
PELAYARAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN
HUKUM DAN KESELAMATAN PELAYARAN**

TESIS

Oleh :

Nama : Rickson Fryadi Marisitua

Nim : 2502198031



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
NAKHODA DAN PANDU DALAM UNDANG-UNDANG
PELAYARAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN
HUKUM DAN KESELAMATAN PELAYARAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Nama : Rickson Fryadi Marisitua
Nim : 2502198031



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rickson Fryadi Marisitua

Nim : 2502198031

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Nakhoda dan Pandu Dalam Undang-Undang Pelayaran Sebagai Upaya Penguatan Kepastian Hukum dan Keselamatan Pelayaran"

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2026



Rickson Fryadi Marisitua
NIM: 2502198031



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NAKHODA
DAN PANDU DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM
DAN KESELAMATAN PELAYARAN**

Oleh :

Nama : Rickson Fryadi Marisitua

Nim : 2502198031

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 25 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130103

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Pjs.Dekan
Fakultas Hukum,


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143


Dr. Temson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 055775966018022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rickson Fryadi Marisitua

Nim : 2502198031

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NAKHODA DAN PANDU DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM DAN KESELAMATAN PELAYARAN"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H	Sebagai Ketua	
---	---------------	---

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
-----------------------------------	-----------------	--

3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
--------------------------------------	-----------------	---

Jakarta, 25 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rickson Fryadi Marisitua

Nim : 2502198031

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : "Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Nakhoda dan Pandu Dalam Undang-Undang Pelayaran Sebagai Upaya Penguatan Kepastian Hukum dan Keselamatan Pelayaran"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2026



Rickson Fryadi Marisitua

NIM: 2502198031

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Nakhoda dan Pandu Dalam Undang-Undang Pelayaran Sebagai Upaya Penguatan Kepastian Hukum dan Keselamatan Pelayaran”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak.

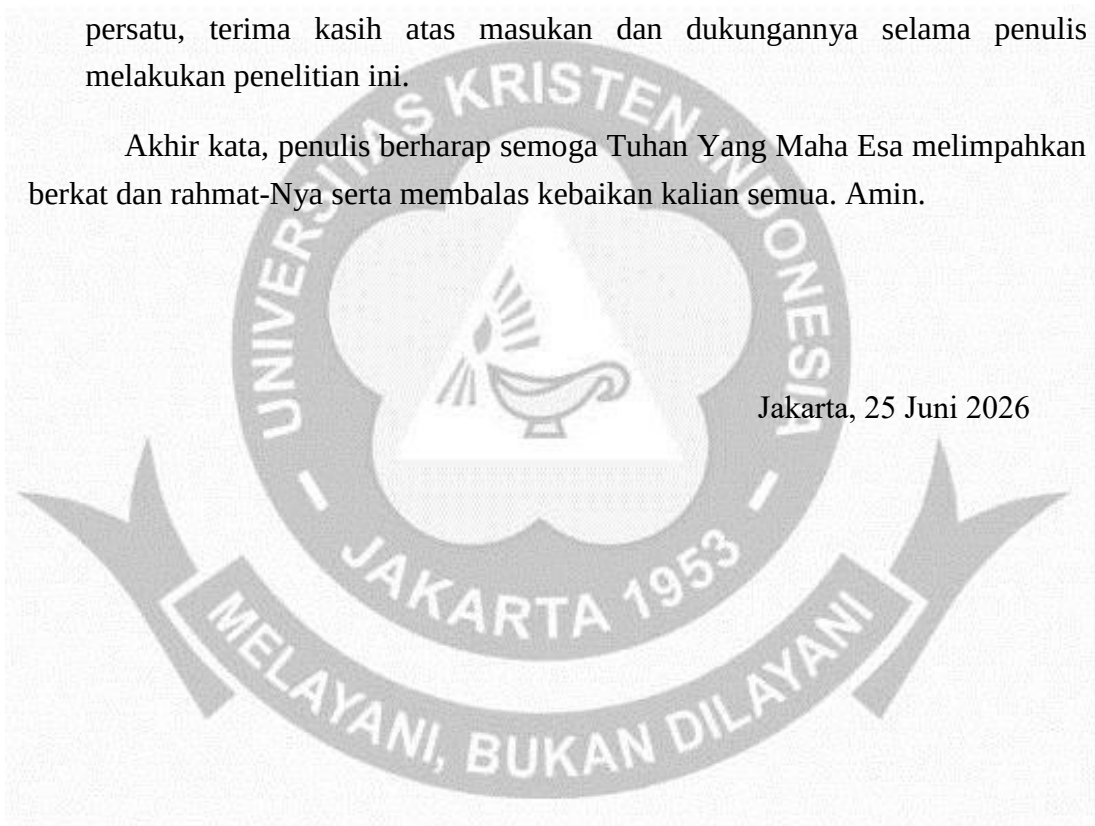
Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Dr. Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku PJS Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing II .
6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan beserta seluruh staf Universitas Kristen Indonesia.
8. Keluarga tersayang, orangtua dan saudara terkasih, Novita Situmorang (istri tercinta) dan Josafat Tigor Parulian Tambunan (putra tercinta) serta seluruh keluarga besar dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

9. Sahabat-sahabat Ellyas Eko Panjaitan, Hernando Pangaribuan dan Kakakku Eprina Manurung, Matthew, Maryoko, Maya, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.
11. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Jakarta, 25 Juni 2026



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	18
6. Orisinalitas Penelitian :	18
G. Struktur Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Teori	27
1. Teori Kepastian Hukum	27
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Konsep	43
1. Reformulasi.....	44
2. Tanggung Jawab Perdata	45
3. Nahkoda	46
4. Pandu	50

5. Kepastian Hukum	51
6. Keselamatan Pelayaran	53
7. Kekaburan Norma dan Kekosongan Norma.....	55
BAB III KELEMAHAN PENGATURAN DALAM UU PELAYARAN DAN	
MODEL REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB	
PERDATA NAKHODA DAN PANDU SEBAGAI UPAYA PENGUATAN	
KEPASTIAN HUKUM DAN PENINGKATAN KESELAMATAN	
PELAYARAN	58
A. Identifikasi Kelemahan Normatif Pasal 143 UU Pelayaran dalam Pengaturan Tanggung Jawab Perdata Nakhoda dan Pandu Selama Pemanduan	58
B. Kekaburan Norma mengenai Batas Kewenangan Pandu dan Kedudukan Nakhoda Selama Pemanduan.....	61
C. Kekosongan Norma mengenai Mekanisme Peralihan atau Pembagian Tanggung Jawab Perdata	64
D. Kelemahan Pengaturan terkait Hak Nakhoda untuk Menolak Instruksi Pandu yang Membahayakan.....	67
E. Kelemahan Pengaturan dalam Situasi Pemanduan Wajib	70
F. Studi Perbandingan sebagai Dasar Pembelajaran dan Perumusan Norma Reformulatif	73
1. Model Inggris: Pilotage Act 1987	74
2. Model Belanda	76
3. Model Amerika Serikat: <i>Compulsory Pilot Doctrine</i>	77
4. Sintesis Komparatif: Persamaan, Perbedaan, dan Pelajaran bagi Indonesia.....	78
G. Model Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Perdata Nakhoda dan Pandu dalam UU Pelayaran	80
1. Prinsip-Prinsip Dasar Model Reformulasi	80
2. Distribusi Tanggung Jawab Perdata: Empat Pihak, Satu Sistem	82
H. Usulan Norma atau Rumusan Pasal Reformulatif.....	83
I. Implikasi Model Reformulasi terhadap Kepastian Hukum dan Keselamatan Pelayaran.....	86
1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum	86
2. Implikasi terhadap Keselamatan Pelayaran	88
3. Penutup: Arah Reformasi Hukum Maritim.....	90
BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA	
NAKHODA SERTA PANDU DALAM UU PELAYARAN DITINJAU DARI	
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KESELAMATAN	
PELAYARAN	93

A.	Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Perdata Nakhoda dalam UU Pelayaran.....	93
1.	Kewenangan Komando Nakhoda	93
2.	Tanggung Jawab Perdata Nakhoda: Sumber dan Konstruksi	97
3.	Batas Tanggung Jawab Nakhoda dalam Situasi Pemanduan ...	101
B.	Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Perdata Pandu dalam UU Pelayaran.....	104
1.	Definisi dan Status Hukum Pandu	104
2.	Problem Normatif Pasal 4 ayat (2) PM 57/2015	107
3.	Status Hukum Pandu dan Implikasi bagi Pertanggungjawaban <i>Vicarious</i>	109
C.	Hubungan Kewenangan antara Nakhoda dan Pandu dalam Kegiatan Pemanduan Kapal	111
1.	<i>Dual Authority</i> : Konsep dan Dimensi Hukumnya	111
2.	<i>Handover Authority</i> : Kekosongan yang Berbahaya	113
D.	Analisis Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Perdata Nakhoda serta Pandu	116
1.	Kerangka Analisis: Teori Kepastian Hukum	116
2.	Evaluasi Kejelasan, Konsistensi, dan Prediktabilitas Norma ..	117
E.	Implikasi Pengaturan terhadap Keselamatan Pelayaran	120
1.	Hubungan antara Kepastian Hukum dan Keselamatan Operasional	120
2.	Distorsi Insentif dan Dampaknya pada Praktik Operasional ...	123
F.	Kerangka Analisis Kecelakaan Kapal dalam Konteks Hubungan Nakhoda dan Pandu	125
1.	Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum	125
2.	Kerangka Analisis Kecelakaan Kapal untuk Penelitian Lanjutan	127
BAB V PENUTUP.....		130
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....		134

ABSTRAK

Judul : Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Nakhoda Pandu Dalam Undang-Undang Pelayaran Sebagai Upaya Penguatan Kepastian Hukum Dan Keselamatan Pelayaran

Pemanduan kapal merupakan kegiatan yang melibatkan dua subjek dengan kewenangan teknis yang saling beririsan, yaitu nakhoda sebagai pemegang komando tertinggi di atas kapal dan pandu sebagai pemberi saran navigasi di perairan tertentu. Penelitian ini membahas reformulasi pengaturan tanggung jawab perdata nakhoda dan pandu dalam Undang-Undang Pelayaran sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan keselamatan pelayaran. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kekaburan dan kekosongan norma mengenai batas kewenangan, kedudukan hukum, serta distribusi tanggung jawab perdata antara nakhoda dan pandu dalam kegiatan pemanduan kapal, terutama pada situasi pemanduan wajib ketika kapal diharuskan menggunakan jasa pandu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah pengaturan serupa pada yurisdiksi lain sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan model distribusi tanggung jawab yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pelayaran belum secara tegas menjelaskan batas kewenangan pandu, posisi nakhoda selama pemanduan, mekanisme peralihan atau pembagian tanggung jawab perdata, hak nakhoda untuk menolak instruksi pandu yang membahayakan, serta pertanggungjawaban dalam situasi pemanduan wajib. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang mengatur distribusi tanggung jawab perdata secara proporsional antara nakhoda, pandu, otoritas penyelenggara pemanduan, dan pemilik atau operator kapal, sehingga hubungan kewenangan menjadi lebih jelas, kepastian hukum menguat, dan standar keselamatan pelayaran nasional meningkat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Perdata, Nakhoda Dan Pandu, Keselamatan Pelayaran

ABSTRACT

Title : Reformulation Of Civil Liability Regulations For Shipmasters and Maritime Pilots Under Indonesian Shipping Law to Strengthen Legal Certainty and Maritime Safety

Ship pilotage involves two actors whose technical authority overlaps, namely the shipmaster as the holder of supreme command on board and the pilot as the navigational adviser within certain waters. This thesis examines the reformulation of civil liability regulations concerning shipmasters and maritime pilots under Indonesian Shipping Law as an effort to strengthen legal certainty and maritime safety. The research problem arises from ambiguity and normative gaps concerning the limits of authority, legal position, and distribution of civil liability between shipmasters and pilots during pilotage operations, particularly in compulsory pilotage situations in which a vessel is required to use pilotage services.

This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature study and analyzed qualitatively. The comparative approach was employed to review similar arrangements in other jurisdictions as a point of reference in formulating a model of liability distribution suited to the national legal system.

The findings show that the current Indonesian Shipping Law does not clearly regulate the limits of pilot authority, the position of the shipmaster during pilotage, the mechanism for transferring or allocating civil liability, the shipmaster's right to reject unsafe pilot instructions, and liability in compulsory pilotage situations. Such ambiguity may create legal uncertainty and complicate the determination of the responsible party in the event of a maritime accident. Therefore, a normative reformulation is required to proportionally allocate civil liability among the shipmaster, the pilot, the pilotage authority, and the shipowner or operator, so that the relationship of authority becomes clearer, legal certainty is strengthened, and national maritime safety standards are improved.

Keywords : Civil Liability, Shipmaster And Pilot, Maritime Safety